

## **BAB II**

### **AWAL PENDUDUKAN JEPANG DI KOTA BOGOR TAHUN 1942**

#### **2.1 Masuknya Jepang Ke Kota Bogor**

Pada 1 Maret 1942, para tentara Jepang yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Imamura Hitoshi berhasil mendarat di Banten, Eretan (Jawa Barat), dan Kragan (Jawa Tengah). Pasukan-pasukan Jepang yang berjumlah 100 sampai 120 ribu orang yang terbagi kedalam 6 sampai 8 divisi di Pulau Jawa bergerak ke wilayah-wilayah yang akan dikuasai. Pasukan divisi ke-2 yang mendarat di Jawa Barat mendapatkan kekuatan tambahan satu detasemen dari divisi ke-38 yang dipimpin Kolonel Shoji. Pasukan-pasukan Jepang yang mendarat di Jawa Barat di bagi 2 kelompok, untuk bergerak menuju pantai di daerah Banten yang dekat dengan Merak dan Teluk Banten, serta menuju daerah Cirebon (Eretan).<sup>26</sup>

Pasukan divisi 2 yang mendarat di teluk Banten tidak langsung membuat basis di tempat pendaratan tersebut, tetapi mereka langsung melanjutkan eskpedisinya ke arah timur yang terbagi dalam 2 kolone. Kolone pertama melalui rute Serang-Balaraja menuju Tangerang, sedangkan kolone kedua melalui rute Serang-Rangkasbitung menuju Bogor. Perjalanan yang ditempuh kolone kedua untuk menuju Bogor mendapatkan hambatan yaitu faktor cuaca buruk dan juga terjadi peledakan sungai-sungai.

---

<sup>26</sup> Zuhdi, S. (2017). *Bogor Masa Jepang 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

Upaya Jepang untuk masuk ke Kota Bogor dilakukan melalui dua arah yang pertama yaitu dengan menaklukan Leuwiliang, dilanjutkan dengan perjalanan melalui Semplak. Kemudian masuk menuju Kota Bogor dengan melewati jalan Cilendek. Dalam upaya ini Jepang mendapat perlawanan dari pihak Belanda. Belanda membentuk “Pasukan Penjaga Kota” atau *Stadswacht*. Akan tetapi “Pasukan Penjaga Kota” dapat dengan mudah ditaklukan oleh pasukan Jepang. Kedua yaitu pada tanggal 5 Maret 1942 pasukan Jepang yang berhasil menduduki ibu kota Batavia tanpa mendapat perlawanan karena ibu kota Batavia menjadi “Kota terbuka” yang tidak akan dipertahankan oleh Belanda. Segera setelah jatuhnya Batavia ke tangan Jepang, tentara ekspedisi Jepang bergerak menuju selatan yaitu menuju Bogor.<sup>27</sup> Kemudian pada sore hari 5 Maret para kolone Jepang yang berjalan melalui Rangkasbitung mulai melakukan tekanan-tekanan berat kepada Belanda dan Australia yang berada di Bogor. Tekanan dari Jepang membuat pasukan-pasukan Belanda mundur ke arah Bandung dan menimbulkan kepanikan kepada pasukan-pasukan Belanda yang mengakibatkan kekacauan lalu lintas konvoi yang akan menuju Bandung. Hal tersebut berhasil membuat Jepang dapat menduduki Kota Bogor.

Kekacauan terjadi di Bogor, Cicurug, Parungkuda, dan Cibadak setelah kedatangan Jepang. Kekacauan tersebut diakibatkan oleh kepanikan yang melanda pasukan-pasukan penjaga. Pada saat kekacauan terjadi beberapa penduduk memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan, yaitu dengan cara

---

<sup>27</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia : Zaman Jepang dan Zaman Republik*. Jakarta: Balai Pustaka.

menjarah atau merampas barang-barang yang ada di rumah-rumah dan toko-toko milik orang Cina serta merampas dari vila milik Belanda. Tidak saja barang-barang yang berharga bagi mereka dan diketahui manfaatnya seperti pakaian, radio, dan perhiasan-perhiasan, tetapi juga barang-barang yang dianggap “aneh” kalau dimiliki orang desa, yakni pesawat telepon.<sup>28</sup>

## 2.2 Awal Pendudukan Jepang di Kota Bogor

Pada 8 Maret 1942 Jendral Letnan Ter Poorten sebagai Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerahkan kekuasaan di Indonesia kepada tentara ekspedisi Jepang tanpa syarat. Dengan berhasil didudukinya Indonesia oleh tentara Jepang, mula-mula diadakan pemerintah pendudukan militer di Pulau Jawa yang bersifat sementara.<sup>29</sup> Hal ini tercantum dalam *Osamu Seirei* No. 1 pasal 1 yang berbunyi:<sup>30</sup>

“Balatentara Nippon melangsungkan pemerintah militer sementara waktu di daerah-daerah yang telah ditempati supaya mendatangkan keamanan yang Sentosa dengan segera”

Pemerintah Jepang juga memiliki tugas memulihkan keamanan dan ketertiban serta mengisi kekuasaan yang sementara kosong. Tugas ini diserahkan kepada *Gunseibu* yang akan memimpin pemerintahan di daerah yang telah ditempati, salah satunya di Jawa Barat yang berpusat di Bandung.<sup>31</sup> Untuk memperlancar jalannya pemerintahan dan mencegah timbulnya kekacauan-kekacauan yang terjadi di beberapa daerah kekuasaan. Jepang mulai melaksanakan

---

<sup>28</sup> Zuhdi, S, *Op.cit*, hlm 16

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>30</sup> Poesponegoro. M. D. & Notosusanto N., *Op.cit*, hlm 14

<sup>31</sup> *Gunseibu* merupakan sebuah organisasi pemerintah militer pada saat menduduki daerah-daerah di Indonesia. Zuhdi, S, *Op.cit*, hlm 20

kebijaksanaannya yang didasarkan pada *Osamu Seirei* No.1 pasal 4 yang berbunyi:<sup>32</sup>

“Sekalian penduduk dan pegawai biasa diwajibkan menurut perintah balatentara Nippon dan pembesar-pembesar pemerintah Nippon. Balatentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai-pegawai yang setia kepada Nippon, begitu jiwa, harta benda yang syah dan agama sekalian pegawai dan rakyat umumnya hendaklah mempercayai balatentara Nippon dan dengan segera melakukan kewajibannya masing-masing sediakala. Akan tetapi barangsiapa yang melanggar perintah balatentara dan pembesar-pembesar Nippon, atau mengacaukan keamanan umum, menghalang-halangi pekerjaan militer, mengganggu atau menganiaya penduduk bangsa Nippon, dengan sembunyi berhubungan dengan musuh, mengacaukan keuangan dan perekonomian, menyembunyikan harta benda dan barang makanan, ataupun merusakkan sumber kekayaan tanah, pabrik-pabrik dan sebagainya, akan dihukum berat menurut undang-undang hukum militer”

Pada bulan April 1942 keadaan di Kota Bogor mulai membaik dan pemerintahan berjalan lancar. Ketertiban dan keamanan di Kota Bogor perlahan mulai dipulihkan oleh pemerintah Jepang. Kemudian, dalam rangka memulihkan keamanan dan ketertiban antara lain dibuat pengumuman berupa larangan untuk berkumpul dan melakukan propaganda yang dapat menguntungkan musuh. Dalam upaya memperbaiki keamanan dan ketertiban pemerintah Jepang masih mendapat gangguan, yaitu terjadinya kerusuhan berbentuk pembunuhan. Hal ini disebabkan karena keadaan sulit yang dihadapi masyarakat, kejadian ini menimpa orang-orang Cina dan golongan peranakan.

Pemerintah Jepang melakukan upaya lain untuk menjaga stabilitas keamanan di Kota Bogor, yaitu dengan membentuk badan propaganda (*Sendenbu*). Badan propaganda (*Sendenbu*) yang dibentuk pemerintah Jepang melakukan tugasnya dengan cara mendekati Omar Sanusi yang saat itu menjadi ketua pengurus usaha

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 21

Rukun Tani dan Rukun Kampung Perindra di Bogor untuk membantu dalam menjelaskan kepada masyarakat Bogor perihal pentingnya keamanan. Kedua belah pihak bersama-sama akan membuat sebuah maklumat.<sup>33</sup> Hal ini disetujui oleh kedua belah pihak, para barisan kampanye keamanan yang membawa alat pengeras suara mengelilingi kampung-kampung di Kota Bogor. Pada umumnya, penduduk menyambut dengan gembira, percaya, dan berharap bahwa kedatangan tentara Jepang akan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik.<sup>34</sup>

Pada saat melaksanakan upayanya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban pemerintah militer Jepang juga melakukan “Nipponisasi” nya dengan bersikap ramah tamah kepada masyarakat Kota Bogor. Hal ini terjadi di beberapa tempat, seperti di Pal Merah, tikungan Bubulak. Jalan Cikeumeuh dan Kedunghalang. Di sana dilakukan penjagaan yang ketat, akan tetapi para militer Jepang bersikap sopan.<sup>35</sup> Selain melaksanakan usaha menjaga keamanan dan ketertiban pemerintah Jepang juga mulai melakukan penutupan sekolah-sekolah yang dipimpin oleh Belanda, sekolah-sekolah tersebut ditutup karena direktornya yang berasal orang Belanda kabur meninggalkan Bogor pada saat pecah perang. Hal ini dimanfaatkan oleh pemerintah Jepang dengan menjelek-jelekan orang Belanda bahwa mereka tidak bertanggung jawab.

Gedung *Shucokan* atau gedung keredesian menjadi tempat pemerintah Jepang dalam menjalankan pemerintahannya di Bogor. Di awal pendudukannya pemimpin pemerintahan di Bogor di jabat oleh Sonoyama. Namun baru 2 bulan

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm 31

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 32

<sup>35</sup> *Ibid*

setengah memimpin Sonoyama meninggal dunia dan kepemimpinan berpindah tangan kepada Tamate Koichi. Kepemimpinan Tamate Koichi di Bogor hanya bertahan selama 4 bulan, hal ini disebabkan karena ia diangkat menjadi Kepala urusan kebun (*Saibai Kigyo Kanri Ko* dan *Rijicho*) oleh *Gunseikanbu*. Tidak lama setelah kepemimpinan di Bogor kosong Sawakimoto diangkat menjadi *Shucokan* Bogor.